

Peran Kohesi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman di Kawasan Transmigrasi Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende

Dimas Bryanputra Christnawan^{1)*}, Sanita Sitinjak²⁾, Septa Prika Pradana³⁾ Shandrina Vellia⁴⁾

¹⁾ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Indo Global Mandiri

²⁾ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

³⁾ Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian & Peternakan, Universitas Diponegoro

⁴⁾ Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email : dimas.bryanputra@uigm.ac.id^{1*)}, sanitasitinjak6254@gmail.com²⁾, sertapradana@gmail.com³⁾, shandrinavell@gmail.com⁴⁾

ABSTRAK

Program transmigrasi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perwujudan pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah, tetapi juga membentuk struktur sosial dan spasial kawasan permukiman dalam jangka panjang. Kohesi sosial menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi bagaimana masyarakat transmigran dan masyarakat lokal berinteraksi serta mengadaptasi sebuah ruang dengan fungsi tertentu, salah satunya ruang hunian atau permukiman. Ruang hunian ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang interaksi antar masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan dan menguatkan sistem kohesi, utamanya di kawasan transmigrasi. Hal ini penting mengingat kawasan transmigrasi yang dihuni tidak hanya masyarakat lokal, tetapi juga para transmigran yang datang ke kawasan transmigrasi dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kohesi sosial terhadap pembentukan pola kawasan permukiman di Desa Kolikapa, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menelaah studi kasus di lapangan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kohesi sosial yang kuat mendorong terbentuknya pola permukiman yang mengelompok, pemanfaatan ruang komunal secara intensif, serta fleksibilitas penggunaan lahan untuk mendukung kegiatan masyarakat transmigrasi di Desa Kolikapa, Kec. Maukaro, Kab. Ende. Penelitian ini menjelaskan bahwa kohesi atau interaksi sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk struktur spasial permukiman transmigrasi dan perlu dipertimbangkan secara integral dalam perencanaan kawasan.

Kata Kunci : Kawasan Perdesaan, Kohesi Sosial, Pola Permukiman, Transmigrasi

ABSTRACT

The transmigration program not only serves as a mechanism for population redistribution and regional development but also shapes the social and spatial structures of settlement areas in the long term. Social cohesion is one of the key factors influencing how transmigrant and local communities interact and adapt to spaces with specific functions, particularly residential and settlement areas. These residential spaces are expected not only to function as arenas for social interaction among community members but also to play an important role in strengthening and sustaining social cohesion, especially within transmigration areas. This is particularly significant considering that transmigration settlements are inhabited not only by local communities but also by transmigrants who relocate to improve their livelihoods and overall well-being. This study aims to analyze the role of social cohesion in shaping settlement patterns in Kolikapa Village, Maukaro District, Ende Regency, Indonesia. A qualitative approach was employed through a field-based case study, utilizing direct observation, in-depth interviews, and document analysis as data collection methods. The findings reveal that strong social cohesion contributes to the development of clustered settlement patterns, intensive use of communal spaces, and flexible land-use arrangements that support the socio-economic activities of the transmigrant community in Kolikapa Village. Furthermore, the study demonstrates that social cohesion and social interaction play a significant role in shaping the spatial structure of transmigration settlements. Therefore, social cohesion should be considered an integral component in settlement and regional planning to promote sustainable community development and spatial integration in transmigration areas.

Keywords : Rural Areas, Social Cohesion, Settlement Patterns, Transmigration

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan permukiman merupakan salah satu aspek strategis dalam perencanaan wilayah, khususnya di negara berkembang yang menghadapi persoalan ketimpangan distribusi penduduk dan pembangunan antarwilayah. Di Indonesia, program transmigrasi telah lama menjadi instrumen kebijakan untuk mengatasi kepadatan penduduk di wilayah tertentu sekaligus mendorong pertumbuhan kawasan perdesaan di daerah tujuan transmigrasi. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan kawasan transmigrasi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan infrastruktur fisik dan tata guna lahan, tetapi juga oleh dinamika aktivitas sosial masyarakat yang berkembang di dalamnya (Budiman & Riyanto, 2018; Rahmawati et al., 2021; Agustian et al., 2021). Hal ini berkaitan erat dengan konsepsi ruang hunian pada masyarakat. Salah satu aktivitas tersebut adalah kawasan permukiman, dimana permukiman ini menjadi salah satu ruang penting untuk masyarakat dalam menunjang kegiatannya sehari-hari (Putri, 2023).

Pola permukiman merupakan susunan dan persebaran unit atau kelompok hunian yang terbentuk sebagai hasil interaksi antara faktor fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dalam suatu wilayah. Menurut Yunus (2000) dalam Putra (2022), pola permukiman dapat dipahami sebagai bentuk spasial persebaran tempat tinggal penduduk yang berkembang sesuai dengan karakteristik wilayah dan aktivitas masyarakat yang berlangsung di dalamnya. Dalam perspektif perencanaan wilayah, pola permukiman tidak hanya menunjukkan lokasi dan bentuk persebaran hunian, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial, aksesibilitas, serta tingkat keterkaitan antarindividu maupun kelompok masyarakat. Ching (2008) menjelaskan bahwa bentuk dan organisasi ruang hunian berkembang melalui proses adaptasi terhadap kebutuhan aktivitas manusia, sehingga perubahan aktivitas sosial akan memengaruhi konfigurasi ruang yang terbentuk. Oleh karena itu, pola permukiman dapat dipandang sebagai perwujudan secara fisik dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang tidak hanya berbentuk interaksi dan solidaritas sosial saja, tetapi pemanfaatan ruang juga menjadi salah satu faktor pembentuk sebuah pola permukiman pada suatu wilayah atau kawasan. Francis (2008) menjelaskan bahwa ruang hunian yang membentuk sebuah pola merupakan hasil adaptasi dari aktivitas yang ada didalamnya, yang selanjutnya pola permukiman dan persebarannya ini cenderung mengikuti pola perubahan kondisi lingkungan pada suatu kawasan atau wilayah (Gobang, 2017). Setiawan et al. (2019) menegaskan bahwa ruang permukiman terbentuk secara sosial (*socially produced space*), di mana perilaku, nilai, dan relasi sosial masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk konfigurasi ruang. Selanjutnya, pemanfaatan ruang hunian berkaitan dengan konsep hunian dengan fungsi yang berubah akibat perubahan tingkat pendapatan dan struktur ekonomi (Fikrah et al., 2022). Secara teori, pola permukiman terbagi menjadi 3, yaitu pola memanjang yang mengikuti jalur transportasi, pola konsentris yang berkembang secara kompak dan menyatu dengan kawasan perkotaan yang telah terbangun, serta pola meloncat yang tumbuh secara sporadis di luar kawasan terbangun. (Yunus, 2000 dalam Putra, 2022). Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan permukiman juga semakin pesat sehingga memengaruhi pola hidup masyarakat dan kondisi lingkungan. Untuk mengurangi kepadatan penduduk di wilayah tertentu, pemerintah menerapkan kebijakan transmigrasi dengan mengembangkan kawasan permukiman baru (Putra, 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kohesi sosial berpengaruh terhadap keberlanjutan komunitas, ketahanan sosial, serta kualitas lingkungan permukiman, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan (Aldrich & Meyer, 2015; Putnam & Garrett, 2020). Selanjutnya, salah satu faktor sosial yang banyak dibahas dalam konteks ini adalah kohesi sosial, yang mencerminkan tingkat solidaritas, rasa saling percaya, dan keterikatan antaranggota masyarakat (Chan et al., 2016). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dampak kohesi sosial terhadap kesejahteraan masyarakat, partisipasi sosial, dan ketahanan komunitas. Selanjutnya, pengaruh langsung kohesi sosial terhadap pembentukan pola spasial permukiman masih relatif terbatas. Dengan kata lain, relasi antara kohesi sosial dan perubahan pola kawasan permukiman pada kawasan transmigrasi masih belum banyak dikaji secara sistematis. Selain itu, sebagian besar studi permukiman transmigrasi masih dilakukan pada skala makro atau regional, sehingga

kajian berbasis studi kasus mikro pada tingkat desa, yang memungkinkan pemahaman kontekstual mengenai interaksi sosial dan pembentukan pola permukiman yang cenderung masih terbatas.

Desa Kolikapa juga menjadi salah satu wilayah yang dikembangkan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program transmigrasi. Meskipun direncanakan dengan pola permukiman tertentu, perkembangan kawasan di Desa Kolikapa memperlihatkan adanya perubahan dan adaptasi pola ruang yang diduga kuat dipengaruhi oleh tingkat kohesi sosial antara warga transmigran dan masyarakat lokal. Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Obie et al (2015), yang menyatakan bahwa proses perpindahan penduduk sangat berdampak pada pembangunan, utamanya berkaitan dengan struktur ruang hunian dan struktur sosial ekonomi masyarakat. Proses perpindahan penduduk ini juga berdampak pada perubahan sebuah model permukiman yang ada didalamnya (Salipu et al., 2022). Namun hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara khusus menganalisis bagaimana kohesi sosial memengaruhi pembentukan pola kawasan permukiman di Desa Kolikapa. Berdasarkan kondisi tersebut, gap penelitian dalam studi ini terletak pada belum optimalnya kajian yang mengintegrasikan dimensi kohesi sosial dengan analisis pola spasial permukiman transmigrasi pada skala desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran kohesi sosial sebagai faktor non-fisik yang memengaruhi pembentukan pola kawasan permukiman di wilayah transmigrasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian permukiman berbasis sosial serta kontribusi praktis bagi perencanaan kawasan transmigrasi yang lebih kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan.

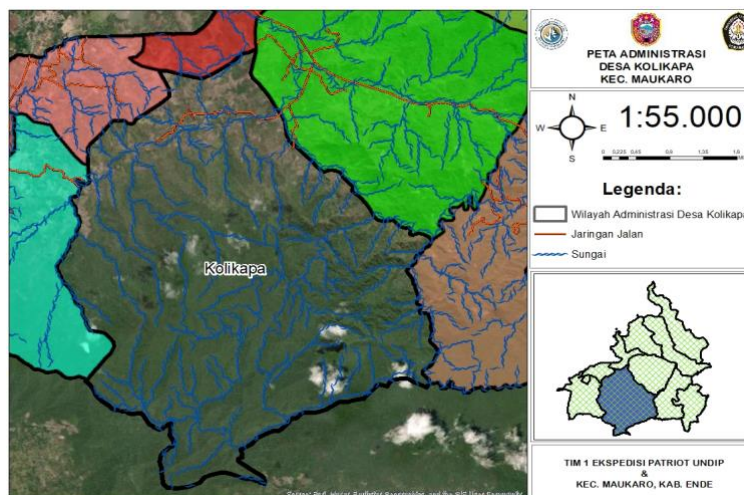
2. DATA DAN METODE

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus berbasis fenomenologi, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dan spasial dalam konteks nyata. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, persepsi, serta praktik sosial masyarakat terkait kohesi sosial dan pembentukan pola kawasan permukiman, yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif semata (Creswell & Poth, 2018). Studi fenomenologi digunakan untuk memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap dinamika interaksi sosial dan spasial di Desa Kolikapa sebagai kawasan transmigrasi yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan sejarah perkembangan permukiman yang khas. Pendekatan ini relevan untuk mengungkap keterkaitan antara kohesi sosial dan perubahan pola permukiman pada skala lokal secara kontekstual.

2.2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian berada di Desa Kolikapa, Kec. Maukaro, Kab. Ende, dimana wilayah Desa Kolikapa menjadi salah satu kawasan transmigrasi berkembang di bagian utara Kab. Ende. Desa ini memiliki posisi strategis dalam sistem pengembangan wilayah Kecamatan Maukaro, baik sebagai pusat aktivitas masyarakat transmigran maupun sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa.



Gambar 1. Wilayah Administrasi Desa Kolikapa

(Sumber: Data SHP Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja Kab. Ende, Data Sekunder 2025)

Desa Kolikapa dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki sejarah sebagai kawasan transmigrasi yang direncanakan dengan pola permukiman tertentu pada tahap awal pengembangannya. Seiring waktu, kawasan ini mengalami perkembangan dan penyesuaian pola ruang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, interaksi antarwarga, serta adaptasi terhadap kondisi lokal. Keberadaan masyarakat transmigran yang hidup berdampingan dengan masyarakat lokal menjadikan Desa Kolikapa sebagai ruang sosial yang heterogen, sehingga relevan untuk mengkaji kohesi sosial dalam konteks pembentukan pola kawasan permukiman.

Objek penelitian dalam studi ini mencakup dua aspek utama, yaitu kohesi sosial masyarakat dan pola kawasan permukiman di Desa Kolikapa. Kohesi sosial dianalisis sebagai fenomena sosial yang tercermin melalui tingkat interaksi antarwarga, solidaritas sosial, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Aspek ini diamati baik dalam hubungan antarwarga transmigran maupun antara transmigran dan masyarakat lokal, yang membentuk struktur sosial desa secara keseluruhan. Sementara itu, pola kawasan permukiman dianalisis sebagai wujud fisik-spasial dari kehidupan sosial masyarakat. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik utama untuk memperoleh data yang komprehensif dan saling melengkapi (triangulasi metode), yaitu:

1. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan secara langsung untuk mengidentifikasi kondisi fisik permukiman, pola tata ruang, orientasi bangunan, serta keberadaan dan pemanfaatan ruang komunal. Observasi juga mencakup pengamatan terhadap aktivitas sosial masyarakat dalam ruang permukiman, seperti kegiatan gotong royong, pertemuan warga, dan aktivitas keagamaan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci, yang meliputi aparat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga transmigran. Teknik ini digunakan untuk menggali persepsi masyarakat mengenai kohesi sosial, pola interaksi sosial, serta pengaruhnya terhadap pembentukan dan perubahan pola permukiman. Adapun berikut rincian dari pemilihan informan pada penelitian ini.

Tabel 1. Justifikasi Pemilihan Informan

Kelompok Informan	Jumlah	Alasan Pemilihan
Aparatur Desa Kolikapa	4 Orang	Merupakan instansi pemerintahan terkecil yang ada di wilayah Desa Kolikapa sekaligus pemilik wewenang dari setiap kebijakan yang berlaku di Desa Kolikapa, Kec. Maukaro, Kab. Ende.
Warga Lokal Desa Kolikapa	10 Orang	Merupakan kelompok masyarakat asli Desa Kolikapa yang telah tinggal sebelum Desa Kolikapa ditetapkan menjadi Kawasan Transmigrasi.

Warga Transmigrasi di Desa Kolikapa	10 Orang	Merupakan kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok transmigran, khususnya transmigran lokal yang berasal dari wilayah di sekitar Kab. Ende yang resmi terdaftar menjadi warga transmigrasi, khususnya di Desa Kolikapa, Kec. Maukaro, Kab. Ende.
-------------------------------------	----------	---

Sumber: Analisis Peneliti; 2025

Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa terdapat 24 orang informan yang terlibat yang tersebar menjadi 3 kelompok utama, yaitu Kelompok Aparatur Desa Kolikapa, Kec. Maukaro; Masyarakat Lokal Desa Kolikapa, dan; Masyarakat yang terdaftar secara resmi sebagai Warga Transmigrasi di Desa Kolikapa. Dapat dijelaskan bahwa justifikasi pemilihan informan kunci didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama yaitu berkaitan dengan perubahan dan perkembangan wilayah desa yang informasinya diharapkan didapatkan melalui aparatur desa, yang didukung oleh hasil informasi yang diberikan oleh kelompok masyarakat lokal di Desa Kolikapa. Selanjutnya, penelitian ini juga melibatkan kelompok masyarakat transmigran yang ada di wilayah Desa Kolikapa untuk mendapatkan informasi mengenai interaksi antar kelompok ataupun antar individu dan relasi serta kohesi sosial masyarakat yang terbentuk di Desa Kolikapa. Dengan demikian, diharapkan informasi bisa didapatkan secara akurat dan relevan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji dokumen perencanaan transmigrasi, peta desa, data kependudukan, serta arsip dan laporan terkait perkembangan Desa Kolikapa. Data ini digunakan untuk memahami kondisi awal permukiman dan membandingkannya dengan kondisi eksisting.

2.3. Tahap Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis tematik dan spasial. Teknik analisis ini dipilih untuk menginterpretasikan data sosial dan data fisik permukiman secara terpadu, sehingga mampu menjelaskan keterkaitan antara kohesi sosial dan pembentukan pola kawasan permukiman di Desa Kolikapa. Berikut merupakan tahapan analisis data dari penelitian ini.

1. Reduksi Data

Pada tahap ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, seperti bentuk interaksi sosial, tingkat partisipasi masyarakat, dan praktik gotong royong. Proses reduksi data membantu peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian dan mengeliminasi data yang tidak berkaitan langsung dengan pengaruh kohesi sosial terhadap pola kawasan permukiman.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap penyajian data dilakukan untuk mempermudah proses interpretasi dan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antara kohesi sosial dan pola kawasan permukiman. Penyajian data ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara temuan empiris di lapangan dengan konsep teoretis secara sistematis dan mudah dipahami.

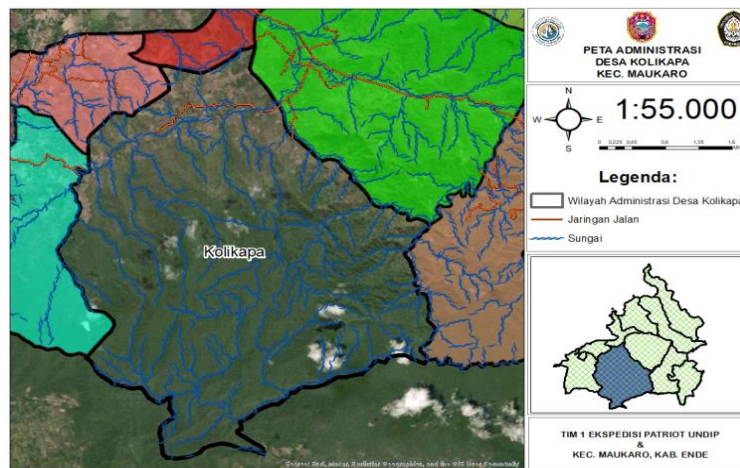
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis dan dikaitkan dengan kerangka teori kohesi sosial, pola permukiman, dan produksi sosial ruang. Proses verifikasi dilakukan secara berkelanjutan melalui pengecekan ulang data, triangulasi sumber, serta diskusi dengan informan kunci untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Transmigrasi Kolikapa

Desa Kolikapa merupakan desa transmigrasi di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang memiliki peran strategis dalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi desa. Desa ini memiliki luas sekitar 14,6 km² dengan kondisi topografi dataran hingga perbukitan, lahan kering potensial untuk pertanian, serta iklim tropis yang mendukung kegiatan pertanian berbasis tadah hujan.



Gambar 2. Wilayah Administrasi Desa Transmigrasi Kolikapa

(Sumber: Data SHP Dinas Transmigrasi & Tenaga Kerja Kab. Ende; Data Sekunder 2025)

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan peternak dengan komoditas utama pertanian dan perkebunan, serta didukung pengembangan usaha rumah tangga. Secara sosial, masyarakat lokal dan transmigran telah terintegrasi dengan baik, didukung modal sosial yang kuat dan partisipasi dalam pembangunan. Dengan ketersediaan lahan, kondisi agroklimat yang mendukung, serta infrastruktur dasar yang terus berkembang, Desa Kolikapa berpotensi besar dikembangkan sebagai kawasan transmigrasi produktif dan berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pembangunan pedesaan yang inklusif.

Pada periode 1984–1989, Kolikapa ditetapkan sebagai Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) melalui program transmigrasi lokal, yang membawa perubahan signifikan pada struktur sosial, pola permukiman, dan sistem pertanian. Integrasi antara masyarakat lokal dan transmigran berlangsung relatif harmonis, didukung pembangunan infrastruktur dasar dan penataan ruang permukiman. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, Kolikapa dimekarkan menjadi desa definitif sekitar tahun 2008–2010. Hingga kini, Kolikapa berkembang sebagai desa agraris produktif dengan masyarakat multietnis yang terintegrasi, ditopang sektor pertanian, peternakan, serta pengembangan kerajinan tenun ikat sebagai identitas sosial-budaya baru.



Gambar 3. Kondisi Hunian di kawasan Desa Kolikapa, Kec. Maukaro, Kab. Ende

(Sumber: Dokumentasi Peneliti; 2025)

Secara demografis, Kawasan Transmigrasi Kolikapa dihuni oleh masyarakat transmigran dan penduduk lokal yang berasal dari wilayah sekitar Maukaro. Komposisi penduduk didominasi usia produktif yang bekerja di sektor pertanian dan peternakan, dengan tingkat pendidikan yang terus meningkat seiring tersedianya fasilitas pendidikan. Hubungan sosial antar kelompok berlangsung harmonis, tercermin dari kerja sama dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Secara umum, berdasarkan data RPJMDes tahun 2025, Desa Kolikapa memiliki total jumlah penduduk sebanyak 552 jiwa, meliputi 286 orang laki-laki dan 266 orang perempuan, serta memiliki 164 KK dalam satu desa. Selanjutnya, berdasarkan dari agama/kepercayaan yang dianut, mayoritas masyarakat Desa Kolikapa menganut agama Katholik

(541) Selanjutnya, dikarenakan statusnya sebagai desa transmigrasi, terdapat beberapa etnis atau suku yang bertempat tinggal di Desa Kolikapa, diantaranya yaitu Suku Ende, Suku Ende Lio, Suku Jawa, dan beberapa suku lainnya yang ada di Desa Kolikapa.

2. Kondisi Kohesi Sosial Desa Transmigrasi Kolikapa

Kondisi kohesi sosial di Desa Transmigrasi Kolikapa berkembang sebagai hasil dari proses interaksi sosial jangka panjang antara masyarakat transmigran dan penduduk lokal yang berbagi ruang hidup yang sama. Sejak fase awal penempatan transmigrasi, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik baru sekaligus membangun hubungan sosial lintas latar belakang budaya. Proses adaptasi tersebut secara bertahap membentuk pola relasi sosial yang ditandai oleh penerimaan sosial, kerja sama, dan integrasi nilai antara kelompok masyarakat. Keberagaman etnis dan asal-usul penduduk tidak menjadi pemicu segregasi sosial, melainkan menjadi bagian dari struktur sosial desa yang relatif inklusif dan stabil.



Gambar 4. Aktivitas Sosial berupa Pembuatan Kain Tenun di Desa Kolikapa

(Sumber: Dokumentasi Peneliti; 2025)

Kohesi sosial di Desa Kolikapa tercermin dari kuatnya dimensi kepercayaan (*trust*) dan solidaritas sosial antarwarga. Kepercayaan ini terbentuk melalui pengalaman kolektif dalam beberapa aktivitas, mulai dari mengelola lahan pertanian, menghadapi keterbatasan infrastruktur dalam menunjang kehidupan masyarakat, peningkatan sektor ekonomi melalui pemberdayaan keahlian masyarakat, serta menyelesaikan persoalan sosial secara musyawarah. Praktik gotong royong, baik dalam pembangunan fisik permukiman maupun dalam aktivitas sosial-keagamaan, menjadi mekanisme utama dalam memperkuat hubungan antarindividu dan antarkelompok. Selain itu, keberadaan struktur sosial formal seperti pemerintahan desa, serta struktur informal berbasis adat dan tokoh masyarakat, berfungsi sebagai pengikat sosial yang menjaga keseimbangan relasi antarwarga transmigran dan penduduk lokal.



Gambar 5. Aktivitas Sosial Diskusi Masyarakat terkait Pembangunan Saluran Drainase di Desa Kolikapa

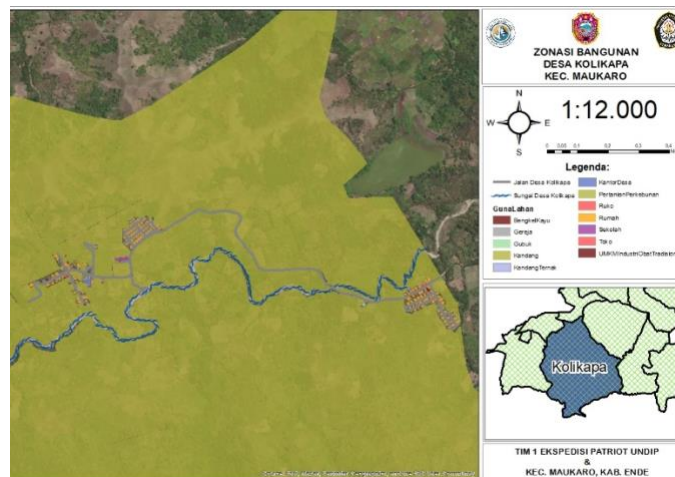
(Sumber: Dokumentasi Peneliti; 2025)

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif juga menjadi indikator penting dari kohesi sosial yang kuat. Warga Desa Kolikapa menunjukkan keterlibatan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan desa, mulai dari kegiatan musyawarah hingga kerja bakti di lingkungan permukiman. Tingginya partisipasi ini mencerminkan adanya rasa memiliki terhadap ruang permukiman dan komunitas desa secara keseluruhan. Dengan demikian, kohesi sosial di Desa Kolikapa tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga sebagai modal sosial yang memungkinkan masyarakat bertahan, beradaptasi, dan berkembang dalam konteks kawasan transmigrasi yang dinamis.

3. Pola Kawasan Permukiman Desa Transmigrasi Kolikapa

Analisis terhadap Peta Administrasi Desa Kolikapa skala 1:55.000 menunjukkan bahwa pola kawasan permukiman berkembang dengan kecenderungan mengelompok (*clustered settlement*) dan mengikuti jaringan jalan sebagai struktur utama pembentuk ruang. Jaringan jalan berperan sebagai tulang punggung aksesibilitas sekaligus sebagai koridor sosial yang menghubungkan antarhunian dan fasilitas desa. Permukiman terkonsentrasi di sepanjang jalan utama dan jalan lingkungan, sementara bagian wilayah yang memiliki akses terbatas atau kepadatan jaringan sungai tinggi relatif tidak berkembang sebagai kawasan hunian.



Gambar 6. Pola Hunian Masyarakat Desa Transmigrasi Kolikapa
(Sumber: Dokumentasi Peneliti; 2025)

Kondisi fisik wilayah, terutama topografi perbukitan dan sistem hidrologi, turut memengaruhi arah dan bentuk perkembangan permukiman. Keberadaan sungai yang tersebar di berbagai bagian wilayah desa mendorong masyarakat untuk memilih lokasi hunian yang dianggap lebih aman dari risiko genangan dan lebih mudah diakses. Berdasarkan hasil wawancara dan reduksi data jawaban informan, diketahui bahwa adanya hubungan yang harmonis antara masyarakat transmigran dengan masyarakat lokal yang didukung dengan tingginya interaksi sosial menyebabkan terbentuknya lokasi hunian yang berdekatan. Hal itu menunjukkan adanya kecenderungan pola bermukim antar masyarakat secara mengelompok dengan kedekatan antar hunian yang tinggi. Selain itu, didapatkan juga bahwa konflik sosial yang terjadi relatif rendah dan seringkali diselesaikan dengan sistem kekeluargaan. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan tidak ditemukannya segregasi antara masyarakat transmigran dan masyarakat lokal, sementara pola hunian yang berkembang dilakukan secara adaptif melalui proses produksi ruang sosial dalam mendukung proses interaksi antar kelompok masyarakat atau individu. Dengan kata lain, pola permukiman tidak berkembang secara acak, melainkan melalui proses seleksi ruang yang mempertimbangkan faktor aksesibilitas, keamanan, dan kemudahan interaksi sosial.



Gambar 7. Pola Hunian Masyarakat Desa Transmigrasi Kolikapa
(Sumber: Dokumentasi Peneliti; 2025)

Selain aspek fisik, pola kawasan permukiman juga mencerminkan dinamika sosial masyarakat. Kedekatan antarhunian menciptakan intensitas interaksi sosial yang tinggi dan memperkuat jaringan sosial antarwarga. Ruang-ruang di sekitar permukiman, seperti jalan lingkungan, halaman rumah, dan fasilitas bersama, berfungsi sebagai ruang sosial informal yang mendukung aktivitas kolektif. Oleh karena itu, pola permukiman Desa Kolikapa dapat dipahami tidak hanya sebagai hasil dari perencanaan awal kawasan transmigrasi, tetapi juga sebagai produk dari praktik sosial masyarakat yang berlangsung secara berkelanjutan.

4. Peran Kohesi Sosial terhadap Pembentukan Kawasan Permukiman Desa Transmigrasi Kolikapa

Kohesi sosial memiliki peran penting dalam proses pembentukan dan penguatan pola kawasan permukiman Desa Transmigrasi Kolikapa. Tingkat interaksi sosial yang tinggi dan hubungan sosial yang erat mendorong masyarakat untuk membangun dan mempertahankan kedekatan spasial antarhunian. Pilihan untuk tinggal berdekatan secara fisik tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis atau ekonomi, tetapi juga pada kebutuhan sosial untuk saling berinteraksi, bekerja sama, dan membangun rasa aman secara kolektif. Pola permukiman yang mengelompok dengan demikian menjadi representasi spasial dari hubungan sosial yang terjalin di antara warga.

Secara umum, pola pembentukan kawasan permukiman atau ruang hunian di Desa Kolikapa sebagai Desa Transmigrasi, membentuk 2 pola utama, yaitu pola memanjang dan pola konsentris, dimana pola permukiman atau ruang hunian ini mengikuti aliran sungai dan persebaran lahan pertanian yang menjadi salah satu mata pencaharian bagi masyarakat, khususnya masyarakat transmigran di wilayah Desa Kolikapa. Hal ini juga didukung dengan adanya beberapa moda transportasi yang mendukung aktivitas warga disekitar wilayah desa. Pola konsentris yang terbentuk dari adanya pola hunian yang terpusat pada satu titik, yaitu kawasan permukiman yang terbentuk secara kompak karena adanya dorongan dari satu atau lebih aktivitas yang terbentuk di lingkungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori Yunus (2000), yang menyatakan bahwa beberapa pola hunian yang ada di sebuah kawasan muncul atau timbul akibat dari suatu proses pengembangan dan penjarangan sifat kekotaan yang terjadi disekitar lingkungan permukiman di suatu wilayah, dalam hal ini wilayah Desa Transmigrasi.

Secara konseptual, temuan di Desa Kolikapa menunjukkan bahwa pembentukan pola kawasan permukiman merupakan hasil dari proses produksi sosial ruang, di mana ruang fisik dibentuk, dimaknai, dan digunakan melalui praktik sosial masyarakat. Kohesi sosial tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pembentukan pola kawasan permukiman, tetapi juga diperkuat oleh ruang aktivitas masyarakat yang mendukung interaksi sosial. Hubungan timbal balik ini menegaskan bahwa dalam perencanaan kawasan transmigrasi, dimensi sosial perlu dipertimbangkan secara integral bersama aspek fisik dan teknis, agar pola permukiman yang terbentuk bersifat adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Peran kohesi sosial juga terlihat dalam fleksibilitas dan adaptasi penggunaan ruang permukiman. Ruang hunian berkembang menjadi ruang multifungsi yang mengakomodasi aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Aktivitas sosial secara informal memungkinkan terjadinya perubahan fungsi ruang tanpa memicu konflik, karena didasarkan pada norma, nilai, dan kepercayaan bersama. Dalam konteks ini, kohesi sosial berfungsi

sebagai mekanisme pengatur non-fisik yang melengkapi aturan formal dalam pengelolaan ruang permukiman.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kohesi sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan pola kawasan permukiman di Desa Transmigrasi Kolikapa. Tingkat kepercayaan, solidaritas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi mendorong terbentuknya pola permukiman yang mengelompok, kedekatan antarhunian, serta pemanfaatan ruang komunal secara intensif. Pola tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik wilayah dan perencanaan awal transmigrasi, tetapi juga oleh dinamika sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kawasan permukiman transmigrasi merupakan produk dari proses produksi sosial ruang, di mana interaksi dan relasi sosial masyarakat berperan penting dalam membentuk dan memodifikasi struktur spasial. Kohesi sosial berfungsi sebagai modal sosial yang memungkinkan adaptasi ruang berlangsung secara fleksibel dan harmonis, tanpa memicu konflik spasial yang berarti. Dengan demikian, dimensi sosial perlu dipertimbangkan secara integral bersama aspek fisik dan teknis dalam perencanaan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Secara praktis, temuan ini memberikan implikasi bagi perencanaan kawasan perdesaan dan transmigrasi agar tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan partisipasi masyarakat. Pendekatan perencanaan yang sensitif terhadap dinamika sosial lokal diharapkan mampu menghasilkan pola permukiman yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, E., Rachmawati, R., Rijanta., & Pitoyo, A.J. (2021). Pola Permukiman Multietnik Di Kampung Islam Kepaon Kota Denpasar Dan Kawasan Kampung Melayu Di Kota Semarang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 1661-1675
- Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. *American Behavioral Scientist*, 59(2), 254–269. <https://doi.org/10.1177/0002764214550299>
- Antariksa. (2015). *Pelestarian Arsitektur dan Kota yang Terpadu*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Budiman, A., & Riyanto, B. (2018). Transmigration settlement development and regional inequality in Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Studies*, 5(2), 101–115.
- Chan, J., To, H. P., & Chan, E. (2016). Reconsidering social cohesion: Developing a definition and analytical framework for empirical research. *Social Indicators Research*, 75(2), 273–302. <https://doi.org/10.1007/s11205-005-2118-1>
- Ching, Francis D. K. (2008). *Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tata*. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh Hanggan Situmorang. Jakarta: Erlangga.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fikrah, M., Witjaksono, A., Sasongko, I., & Imaduddina, A. H. (2022). IDENTIFIKASI PERUBAHAN POLA PERMUKIMAN SUKU BAJO DI DESA JAYA BAKTI KECAMATAN PAGIMANA KABUPATEN BANGGAI. *Jurnal Ruang*, 67-77.
- Gobang, A. A. K. S. (2017). Pola Pemanfaatan Dalam Tata Spasial Hunian Suku Bajo yang Berkembang Di Kampung Wuring Kota Maumere. *NALARs Jurnal Arsitektur*, 17, 51–64.
- Hidayat, A., & Nugroho, I. (2018). Planning and development of transmigration settlements in rural Indonesia. *Journal of Rural Planning and Development*, 9(1), 45–58.

- Obie, M., Soetarto, E., Sumarti, T., & Saharuddin. (2015). Sejarah Penguasaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. *Paramitha*, 25(1), 1243–1248.
- Putnam, R. D., & Garrett, S. R. (2020). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.
- Putra, I. W., Dwijendra, N. K., & Putra, I. D. (2022). POLA SPASIAL PERTUMBUHAN KAWASAN PERMUKIMAN DI DESA DALUNG. *Jurnal Paduraksa*, 15-23.
- Putri, N. P. (2023). Transformasi dan Pola Spasial Permukiman Perajin Perak Tradisional di Desa Celuk, Gianyar. *Jurnal Arsitektur Pendapa*, 82-89.
- Rahmawati, D., Yuliasuti, N., & Sariffuddin, S. (2021). Social interaction and spatial transformation in transmigration settlements. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 623, 012042. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/623/1/012042>
- Salipu, M. A., Mulyati, A., Nurmaningtyas, A. R., & Santoso, I. (2022). Kajian Perubahan Permukiman Suku Bajo Berdasarkan Konsep Transformasi Kebudayaan Ignas Kleden. *Mintakat: Jurnal Arsitektur*, 23(2), 1–14. <https://doi.org/10.26905/jam.v23i2.7830>
- Setiawan, B., Pratama, A. R., & Nugroho, S. (2019). Social production of space in settlement development. *Journal of Urban and Regional Studies*, 11(3), 215–228.
- Yuliasuti, N., & Sariffuddin, S. (2017). Spatial patterns and social interaction in rural settlements. *Journal of Rural Studies*, 54, 13–23. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.001>